

BAB V

SIMPULAN

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-Tha Farma pada tanggal 9 Oktober sampai 11 November 2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA di Apotek pro-Tha Farma telah memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi serta tanggung jawab apoteker di apotek
2. Mengetahui bahwa apoteker harus memahami peran dan fungsi apoteker dalam kegiatan kefarmasian di apotek terutama dalam pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat yang rasional sehingga tujuan terapi dapat tercapai.
3. Mengetahui bahwa seorang apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk dapat menunjang dalam melakukan pengembangan apotek antara lain apoteker memiliki kemampuan dalam manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya Apotek.
4. Mengetahui bahwa seorang apoteker harus memahami dan menguasai sistem manajemen apotek meliputi struktur organisasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan alat kesehatan, dan pelaporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika.
5. Dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis bagi calon apoteker bagaimana melakukan kegiatan pengelolaan

obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan melakukan KIE.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus memberkahi diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan di apotek, sinonim dari obat – obatan dan penggolongan obat.
2. Calon apoteker diharapkan untuk belajar ilmu komunikasi agar dapat mengetahui bagaimana cara Apoteker dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat secara rasional.
3. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
4. Calon apoteker hendaknya mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek sehingga dalam melakukan sesuatu terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi, ed. 16, 2016, PT.Medidata Indonesia, Jakarta
- British Medical Association, 2011, *British National Formulary, 61 th ed.*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- BNF, 2009, BNF Children: The essential resource for clinical use of medicines in children, BMJ Group, Germany
- Depkes RI, 2017, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Depkes RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Depkes RI, 2013, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta
- Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan,*

dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.

Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta.

Depkes, RI, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/ Menkes/ SK/ VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta.

Depkes, RI, 2003, *Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/ Menkes/ SK/ VII/ 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*, Jakarta.

Depkes, RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ Menkes/ 068/ I/ 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*, Jakarta.

Depkes, RI, 2011, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jakarta.

Depkes, RI., 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak, 2012, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-31/ PJ/ 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*, Jakarta.

ISO *Informasi Spesialite Obat Indonesia volume 49, 2014*, PT.ISFI, Jakarta.

Katzung, B.G., 2004, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Diterjemahkan oleh Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Buku III, sixth edition, Penerbit Salemba Medika, Jakarta.

- Kaur SP, Rao R dan Nanda S, 2011. Amoxicillin: A Broad Spectrum Antibiotic. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Jakarta.
- Lacy, C. F., etc, 2009, *Drug Information Handbook, 17th edition*, Lexi-Comp Inc & Apha North American, American Pharmaceutical Association.
- Presiden Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2012, *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*. Edisi III. Airlangga University Press, Surabaya.
- Shann, F., 2014, *Drug Doses, Intensive Care Unit Royal Children's Hospital*, Australia.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference, 36th ed.*, Pharmaceutical Press, Grayslake.